

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah cukup luas, sehingga pemerintahan yang ada yaitu dari ibukota negara hingga desa, dusun ataupun Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Menurut Aristoteles dalam Huda (2010: 54) bahwasanya suatu negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya. Tujuan negara ini juga termasuk negara Indonesia, luasnya wilayah dan penduduk yang banyak dengan berbagai perbedaan bahasa serta adanya perbedaan sumber daya alam yang tidak merata merupakan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu juga, negara Indonesia merupakan negara demokrasi di mana memungkinkan masyarakat mampu menyuarkan keluhan dan memberikan kritik terhadap pemerintahan atau menyampaikan aspirasinya.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang disalurkan kepada pemerintah, salah satunya yaitu mengenai pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Pada dasarnya rencana untuk membentuk daerah otonomi baru harus melalui proses perumusan kebijakan publik. Menurut Isa Wahyudi dkk (2008:14) adanya empat tahapan dalam proses perumusan kebijakan yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan

alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah, dan penetapan kebijakan. Selain itu, pada proses yang dilakukan untuk membentuk daerah otonomi baru tentu memiliki tujuan.

Menurut Agustino (2014: 111) tujuan pemekaran daerah yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan demokrasi daerah, pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Seperti yang dijelaskan bahwasanya pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru bertujuan agar terciptanya pelayanan publik yang merata serta demi tercapainya kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun adanya aspirasi tentang pembentukan wilayah pemerintahan yang diusulkan bisa saja ditolak karena tidak memenuhi persyaratan atau alasan lainnya, namun bukan berarti tidak adanya pemekaran atau pembentukan daerah otonom yang baru. Seperti halnya baru-baru ini adanya provinsi baru di Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan Utara yang telah terealisasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2016, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak. Tujuan dari pembentukan provinsi ini juga untuk meningkatkan pelayanan di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Selain dari Provinsi Kalimantan Utara, terjadi juga usulan untuk pemekaran daerah di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Babel tahun 2015, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14km². Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan adalah kabupaten terluas dengan luas 3.607,08 km² sedangkan wilayah kedua yang terluas setelah Kabupaten Bangka Selatan adalah Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah 2.950,69 km².

Meski demikian, dari data tersebut Kabupaten Bangka Selatan adalah wilayah yang paling luas, namun yang sempat muncul isu pembentukan kabupaten baru adalah di Kabupaten Bangka sebagai wilayah nomor dua terluas di Provinsi Kepulauan Bangka. Salah satu isu pembentukan daerah otonomi baru yaitu pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Dengan berbagai alasan tentang jarak tempuh yang harus dilakukan saat melakukan administrasi ke ibukota kabupaten hingga untuk tujuan kelancaran pelayanan yang kemudian menjadi alasan dari munculnya isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara direncanakan akan mengambil tempat di wilayah Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Hal ini mengingat bahwasanya luas wilayah Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip apabila diintegrasikan akan memiliki total wilayah

kurang lebih seluas 1.138,71 km². Selain itu perjalanan dari pusat ibukota Kecamatan Belinyu ke Sungailiat memerlukan waktu sekitar satu jam, apalagi jika masyarakat yang tinggal di daerah yang lebih jauh dari pusat ibukota Kecamatan Belinyu akan memerlukan waktu satu jam setengah atau bahkan dua jam untuk menempuh perjalanan dari Kecamatan Belinyu ke Sungailiat. Isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara merupakan suatu tuntutan dan dukungan dari masyarakat dan juga elite lokal.

Menurut Ibrahim dkk (2014: 32) kuatnya ide pemekaran wilayah yang direncanakan menjadi Kabupaten Bangka Utara sejurus dengan menguatnya dukungan dari seluruh eksponen masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip mendukung terbentuknya Kabupaten Bangka Utara. Di sinilah elite lokal juga memiliki peran dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Seperti yang dijelaskan menurut Field dan Higley dalam Bungin (2010: 304) yang beranggapan dalam perspektif elitis tujuan-tujuan sosial yang ada di masyarakat cenderung dirancang dan diawasi oleh kelompok elite atau minoritas yang memiliki keunggulan atau penguasaan yang efektif misalnya dalam formulasi kebijakan dan memutuskan persoalan yang kemudian memiliki pengaruh yang meluas. Jadi, meskipun jumlah elite lebih sedikit daripada masyarakat, namun elite tersebut memiliki kemampuan lebih untuk mempengaruhi proses dan pengambilan keputusan dalam suatu persoalan, termasuk di dalamnya mengenai isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Selain kemampuan dan posisi yang strategis dalam bidang ekonomi, militer

dan politik ada juga seperti tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, akademisi, dan tokoh pemuda.

Selain itu, secara sosiologis bahwasanya masyarakat di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip adalah masyarakat yang bersifat dinamis, artinya ingin atau mampu melakukan sebuah perubahan untuk kemajuan bersama. Seperti yang dijelaskan menurut Ibrahim, dkk (2014: 139) masyarakat di kawasan Bangka Utara merupakan masyarakat yang dinamis dan berperan penting dengan berbagai cara untuk memperjuangkan terbentuknya Bangka Utara. Jadi, hal ini menambah suatu alasan untuk melakukan pemekaran daerah melalui peran elite lokal maupun masyarakat mengenai pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Berbagai hal inilah yang menjadi alasan untuk mengusahakan pembentukan Kabupaten Bangka Utara, akan tetapi setelah dari tahun ke tahun dan hingga saat ini rencana pembentukan Kabupaten Bangka Utara belum terealisasi. Rencana pembentukan Kabupaten Bangka Utara sampai saat ini masih menjadi tanda tanya. Kemudian sejauh ini peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara tersebut belum diketahui secara jelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara?

2. Bagaimanakah dukungan modal sosial dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini akan mengarah sesuai dengan latar belakang permasalahannya sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.
2. Untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan dukungan modal sosial dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan sosial, khususnya tentang peran dan dukungan elite lokal yang dapat dianalisis melalui teori sosiologi politik dan modal sosial.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan saran kepada pemerintah dalam memahami permasalahan terkait pemekaran daerah, khususnya dari segi elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait pemekaran daerah yang khususnya tentang peran elite lokal dan pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan memperkaya wawasan serta pemahaman tentang peran elite lokal, khususnya dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang peran dan modal sosial elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Kemudian dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian

terdahulu sebagai tinjauan pustaka yang relevansi terkait penelitian ini yaitu beberapa penelitian.

Penelitian pertama yaitu dilakukan oleh Catur Hantoko (2011) dalam skripsi yang berjudul "*Peran dan Pengaruh Elite Politik Lokal dalam Mendukung Percepatan Pembangunan di Kota Koba*". Penelitian ini membahas tentang identifikasi elite politik lokal Koba, peran dan kedudukan serta menganggap peran elite politik lokal menjadi urgensi dalam mendukung percepatan pembangunan yang ada di Kota Koba atau Kabupaten Bangka Tengah.

Pada penelitian yang dilakukan Catur Hantoko (2011) menggunakan teori elite, teori kelas dan juga konsep pembangunan dalam menganalisis serta mendeskripsikan peran dan pengaruh elite politik lokal. Dalam penelitian ini pula peran elite politik lokal Kota Koba harus ditunjukkan sejauh mana mampu berperan sesuai dengan jabatan struktural yang dimiliki sebagai elite politik lokal seperti peran bupati dan wakil bupati Bangka Tengah serta elite politik lokal lainnya yang ada di Bangka Tengah. Peran dan kedudukan ini juga harus dipertanggungjawabkan oleh elite politik lokal dalam menunjang kepentingan bersama demi percepatan pembangunan Kota Koba. Penelitian ini menjelaskan apabila kekuasaan yang dicemari dalam kepentingan individu akan mempengaruhi sistem pemerintahan ataupun berimbas pada kualitas pelayanan umum yang juga menjadi indikator dalam pembangunan di Koba.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Tri Utari (2016) dalam skripsi yang berjudul “*Formulasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten Bangka Utara*”. Penelitian ini membahas tentang model proses politik dalam kebijakan melakukan pemekaran Kabupaten Bangka Utara. Tiga dimensi dalam Model Sistem Politik untuk menganalisis proses perumusan atau pembuatan kebijakan publik yang berupa *input*, proses, dan *output* tentang pemekaran Kabupaten Bangka Utara.

Pada penelitian ini dilakukan oleh Tri Utari (2016), *input* yang dilakukan yaitu berupa masukan ataupun tuntutan yang diperoleh dari berbagai pihak untuk melakukan pemekaran wilayah. Tuntutan merupakan *input* penting bagi pembuat kebijakan yang tidak boleh diabaikan dan dukungan serta sumber-sumber juga merupakan *input*. Kemudian proses dalam penelitian ini dimaksud yaitu keberfungsian aktor internal birokrasi pemerintah atau elite politik, yaitu badan-badan legislatif, eksekutif dan aktor-aktor eksternal birokrasi pemerintah dalam mengubah input yang berupa tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan tersebut menjadi sebuah *output*. Kemudian *output* adalah hasil yang berupa kebijakan yang dilakukan terkait dengan pemekaran Kabupaten Bangka Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Utari (2016) berfokus sejauh mana proses yang dilakukan dalam upaya pemekaran Kabupaten Bangka Utara. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka, tepatnya di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Dalam penelitian ini berbagai elite politik dan tokoh

lainnya memberikan penjelasan tentang proses yang dilakukan dalam pemekaran Kabupaten Bangka Utara.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rezi Prayoga (2017) dalam skripsi yang berjudul "*Pemekaran Desa dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial-Kultural Masyarakat (Studi Pada Masyarakat "Kundi Bersatu" Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat)*". Penelitian ini berfokus pada pemekaran desa dan implikasinya dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat Kundi Bersatu di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Dalam penelitian ini menggunakan teori modal sosial James Coleman dalam menganalisis tentang implikasi kehidupan sosial-kultural dari pemekaran desa yaitu Kundi Bersatu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasca pemekaran tersebut masyarakat tetap bersatu dan modal sosial tetap terjalin.

Jadi, berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya terdapat beberapa kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu ketiga penelitian terkait dengan peran yang dilakukan berbagai elemen dalam masyarakat untuk proses pencapaian tujuan bersama. Perbedaannya yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Catur Hantoko (2011), hanya menjelaskan tentang peran dan pengaruh elite politik lokal dalam percepatan pembangunan yang ada di Kota Koba.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tri Utari (2016), hanya menjelaskan sebatas formulasi kebijakan yang dilakukan dalam pemekaran

Kabupaten Bangka Utara, di mana adanya proses-proses yang dilakukan dalam melihat sejauh mana proses yang telah dilakukan dalam pemekaran wilayah tersebut. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rezi Prayoga (2017) hanya menjelaskan implikasi dari pemekaran desa dan modal sosial masyarakat yang ada sebelum dan sesudah pemekaran. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, bisa dikatakan merupakan penggabungan ketiga tema dalam penelitian sebelumnya, yaitu tentang elite politik lokal, proses pembentukan Kabupaten Bangka Utara dan pemekarannya meskipun belum terealisasi. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

F. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pembahasan penelitian menggunakan teori-teori yang mengulas tentang elite serta modal sosial. Adapun teori-teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Konsep dan teori elite

Bottomore dalam bukunya *Elite dan Masyarakat* menjelaskan bahwa konsep “elite” digunakan pada abad ke tujuh belas untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas yang sempurna, penggunaan kata itu kemudian diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi. Kemudian menurut Oxford English Dictionary dalam Bottomore (2006: 1)

pada bahasa Inggris penggunaan awal kata “elite” adalah pada tahun 1823, ketika kata itu telah diterapkan untuk kelompok-kelompok sosial. Namun istilah itu belum digunakan secara luas dalam tulisan-tulisan sosial dan politik hingga akhir abad ke sembilan belas di Eropa, atau hingga tahun 1930-an di Inggris dan Amerika, ketika kata itu disebarakan melalui teori-teori sosiologis tentang elite, terutama dalam tulisan-tulisan Vilfredo Pareto.

Menurut Pareto dalam Bottomore (2006: 2) menjelaskan bahwa konsep tentang elite ini semata-mata berfungsi untuk menekankan ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup sosial, dan sebagai titik awal untuk mendefinisi “elite yang memerintah”. Kemudian membagi elite menjadi dua kelas yaitu : elite yang memerintah (*governing elite*), yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan, dan elite yang tak memerintah (*non-governing elite*), yang mencakup sisanya. Jadi dalam hal ini terdapat dua lapisan dalam masyarakat, yaitu : (1) Lapisan yang rendah nonelite, yang di sini pengaruh yang mungkin dimilikinya terhadap pemerintan tidak menjadi perhatian kita; kemudain (2) lapisan yang tinggi, elite, yang dibagi menjadi dua : (a) elite yang memerintah; (b) elite yang tak memerintah.

Menurut Pareto dalam Damsar (2012: 39-40) bahwa dari segi intelektual, moral, dan fisik, individu-individu tidak semua sama. Konsekuensi logis perbedaan tersebut adalah masyarakat juga berbeda-beda. Perbedaan dalam masyarakat dapat dilihat pada perbedaan kelompok-

kelompok yang ada di dalamnya. Pada setiap kelompok selalu terdapat segelintir orang yang lebih cakap dan pengaruh daripada yang lainnya. Elite yaitu orang-orang yang tampil di depan sebagai pihak yang berpengaruh di dalam kelompok.

Jadi, sebenarnya elite merupakan penekanan ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat. Ketidaksetaraan tersebut dapat berupa perbedaan kemampuan dalam segi intelektual, ekonomi, dan fisik. Elite ini biasanya merupakan minoritas yang memiliki kecapakan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial. Inilah yang disebut sebagai elite dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini elite yang dimaksud yaitu elite lokal yang bukan hanya lebih cakap dan berpengaruh di bidang politik, melainkan juga di bidang sosial masyarakat yang ada di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip atau yang berkaitan dengan isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Mosca menerangkan dalam Botttomore (2006: 4-5) bahwa penguasaan minoritas yang lebih berpengaruh dibandingkan mayoritas. Kekuasaan minoritas tidak dapat dilawan oleh masing-masing individu dalam mayoritas, yang berdiri seorang diri di hadapan seluruh minoritas yang terorganisir. Minoritas yang berkuasa biasanya memiliki atribut, yang nyata atau tampak, yang sangat dihargai dan berpengaruh dalam masyarakat di mana mereka hidup. Hal inilah berarti bahwa elite yaitu minoritas yang memiliki kekuasaan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Elite ini

merupakan orang-orang yang dihargai dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat pada umumnya.

Teori elite memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup: (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa.

Menurut Mosca dan Pareto dalam Nurhasim, dkk (2005: 12-13) membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*). Dalam hal ini menurut Nurhasim, dkk (2005: 16) bahwasanya kajian ini membagi dua kategori elit dalam konteks lokal sebagai berikut, yaitu elit politik lokal dan elit non politik lokal.

a. Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui proses pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Elit inilah yang menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya

seperti: gubernur, bupati, walikota, ketua DPRD, anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik.

- b. Elit non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh dan kemampuan lebih untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non-politik ini seperti : elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Jadi, kedua kategori elite dalam hal ini menunjukkan adanya suatu perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dari segi politik maupun sosial dalam masyarakat, baik itu berkaitan dengan elit politik lokal maupun elit non-politik lokal. Kedua hal ini menjadi suatu kategori untuk menganalisis tentang isu Kabupaten Bangka Utara baik melalui elite politik, kepemudaan, profesi atau lainnya yang lebih tepatnya dengan elite lokal.

Selain dua kategori elite tersebut, adapula aktor-aktor yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Kismartini (2010: 90) bahwa ada dua kelompok aktor atau pemeran serta dalam pembuatan kebijakan, dua kelompok tersebut yaitu:

1. Para pemeran serta resmi, yaitu merupakan orang-orang yang terlibat dalam agen-agen pemerintah(birokrasi), presiden(eksekutif), legislatif dan yudikatif.

2. Para pemeran serta tidak resmi, yaitu orang-orang yang terlibat dalam kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya para pemeran serta resmi dan tidak resmi menunjukkan bahwa kedua hal tersebut adalah elite-elite yang memiliki kemampuan atau pengaruh lebih. Elite-elite yang secara resmi yaitu di bagian pemerintahan, sedangkan elite-elite yang tidak resmi berada dalam kelompok kepentingan, partai-partai politik, dan warga negara individu yang misalnya tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Menurut Field dan Higley dalam Bungin (2010: 304) perspektif elitis beranggapan tujuan-tujuan sosial cenderung dirancang dan diawasi oleh kelompok elite. Dengan superioritas yang dimiliki maka lebih leluasa memonopoli kekuasaan secara efektif. Dalam banyak hal inilah para elite sangat dominan terutama dalam formulasi kebijaksanaan dan memutuskan persoalan serta selalu memperoleh keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan massa.

Sementara menurut Mills dalam Bungin (2010: 304) menjelaskan orang-orang yang menduduki posisi tingkat atas dalam institusi ekonomi, militer, dan politik membentuk kurang lebih elite kekuasaan yang terintegrasi dan terpadu, serta keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat menentukan struktur dasar dan arah kehidupannya masyarakat. Artinya elite merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang bisa menentukan arah kehidupan dalam masyarakat. Elite sangat berpengaruh dalam

mengambil keputusan dan dampaknya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisi-posisi yang dimiliki elite tersebut biasanya berbeda, dapat melalui kemampuan di bidang politik, ekonomi ataupun militer.

2. Konsep dan Teori Modal Sosial

Menurut Field (2010) gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerjasama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik. Pada awalnya gagasan yang menggambarkan ikatan sosial sebagai bentuk modal hanya sekedar metafora.

Kemudian Putnam dalam Field (2010: 18) menjelaskan bahwa paling tidak hal ini ditemukan enam kali selama abad ke-20, dan setiap kali ditemukan menyatakan bahwa menggunakan hubungan untuk bekerja sama membantu orang memperbaiki kehidupan mereka. Hal ini berarti bahwa dalam jaringan sosial merupakan hal penting dalam masyarakat. Di dalam jaringan ini terdapat sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut biasanya merupakan hasil yang ingin dicapai dan berupa suatu timbal balik dalam hubungan jaringan.

Menurut Putnam dalam Field (2010: 51) modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan

terkoordinasi. Kemudian definisi Putnam tentang modal sosial mengalami sedikit perubahan yaitu modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Modal sosial dapat disimpulkan sebagai suatu bagian dari kehidupan dalam masyarakat yang juga berperan penting. Modal sosial yang ada dapat mendorong masyarakat ataupun partisipan dalam melakukan tindakan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial yang ada di dalam suatu masyarakat juga dapat memfasilitasi tindakan bersama yang dilakukan agar tindakan yang dilakukan bisa terkoordinasi dan lebih efektif. Modal sosial sebagaimana yang dimaksud Putnam dapat membuat masyarakat melakukan tindakan-tindakan bersama dalam mencapai tujuan bersama.

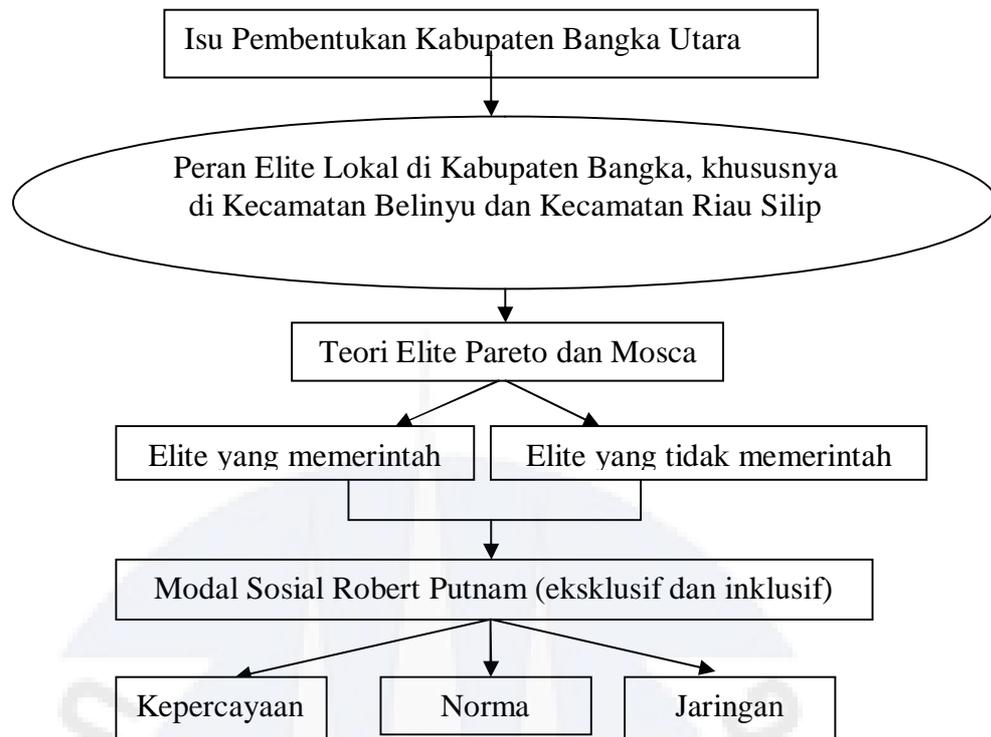
Putnam dalam Field (2010: 52) memperkenalkan perbedaan antara dua bentuk dasar modal yaitu menjembatani (inklusif) dan mengikat (eksklusif). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas. Sedangkan modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda. Kemudian inklusif dan eksklusif menjadi penting dalam modal sosial.

Menurut Putnam dalam Field (2010: 106) bahwa modal sosial yang mengikat atau eksklusif didasarkan atas keluarga, teman dekat dan

kelompok akrab lain. Hal ini berorientasi ke dalam dan mengikat orang dari posisi sosial serupa, hal ini cenderung meneguhkan identitas eksklusif dan kelompok homogen. Maksudnya dalam modal sosial yang mengikat ini masyarakat yang ada cenderung homogen dengan banyak meneguhkan kesamaan. Sebaliknya, modal sosial yang menjembatani atau inklusif menghubungkan orang pada kenalan-kenalan jauh yang bergerak pada lingkaran yang berbeda dengan lingkungan mereka sendiri, hal ini cenderung membangun identitas yang lebih luas dan resiprositas lebih banyak ketimbang meneguhkan pengelompokan sempit. Hal ini menjadikan dalam modal sosial yang menjembatani dapat menghubungkan orang-orang dalam membangun timbal balik yang lebih luas.

G. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka, sesuai dengan isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Fokus penelitian ini lebih kepada peran dan dukungan elite lokal dalam pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Adapun untuk mempermudah dalam memahami mengenai kerangka berpikir pada penelitian, maka peneliti menguraikan kerangka berpikir melalui bagan yaitu :



Gambar 1.1 Bagan Alur Pikir

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dideskripsikan bahwa isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara yang direncanakan akan mengambil tempat di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara muncul karena adanya berbagai alasan untuk terciptanya suatu kelancaran administrasi, percepatan akses pelayanan, dan pemerataan pembangunan di daerah tersebut.

Isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara merupakan sebuah tuntutan atau aspirasi yang dilakukan masyarakat dan elite lokal. Elite-elite lokal yang terdapat dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara antara lain yaitu orang-orang yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat dan juga lebih dihargai karena memberikan pengaruh penting dalam melakukan pengambilan

keputusan dibandingkan dengan mayoritas di suatu masyarakat. Elite yang dimaksud antara lain yaitu tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah, dan lainnya.

Elite yang memerintah maupun elite yang tidak memerintah mengoptimalkan modal sosial yang ada. Elite mengupayakan untuk melakukan proses-proses sesuai dengan kedudukan dan perannya. Melalui modal sosial, baik yang eksklusif maupun yang inklusif, elite berusaha untuk menggerakkan kepercayaan, norma, dan juga jaringan untuk melancarkan upaya pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan pada penelitian yang sistematis. Adanya sistematika penulisan ini akan membuat penelitian menjadi terarah dan terstruktur. Adapun sistematika pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab akan membuat beberapa bahasan yaitu:

Bab pertama, menjelaskan latar belakang yang dalam penelitian ini berawal dari pemekaran daerah yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menjadi pokok masalah yaitu mengenai peran dan dukungan elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini yaitu berkaitan dengan konsep

dan teori elite. Tahapan terakhir yaitu kerangka berpikir yang dibuat untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh penelitian yang sistematis dalam alur pikir penelitian.

Dilanjutkan dengan bab kedua yakni pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bangka, khususnya di Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Objek penelitian mengenai peran elite lokal dan dukungan modal sosial dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang tak berstruktur dan informan diperoleh melalui teknik *snowball sampling*. Teknik analisis data melalui tahap reduksi data untuk memilih data yang fokus sesuai tujuan, tahap *display data* berupa data yang telah diolah tersusun secara sistematis, dan tahap verifikasi data yang berupa kesimpulan secara jelas dari permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian. Dalam gambaran umum, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang kondisi geografis, kependudukan, pemerintahan, dan kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka, khususnya di wilayah Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip. Hal ini dikarenakan daerah Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip sebagai daerah yang direncanakan menjadi Kabupaten Bangka Utara.

Selanjutnya dalam bab keempat merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pada bab pembahasan pertama mendeskripsikan tentang peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Pada pembahasan pertama ini mendeskripsikan identifikasi elite dan dukungan elite lokal. Pembahasan kedua yang mendeskripsikan tentang dukungan modal sosial dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara yang di dalamnya ada kepercayaan, norma, dan jaringan.

Bab terakhir merupakan bab kelima yang berisi penutup yang di dalamnya membahas kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan peran yang dilakukan elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Selain itu berisi implikasi teori tentang modal sosial yang dipertegas sehingga mencapai kesimpulan mengenai peran elite lokal dan modal sosial dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Setelah itu adanya bagian saran yang dianalisis berdasarkan uraiannya pada bab-bab sebelumnya serta berupa rekomendasi-rekomendasi berbagai pihak terkait peran elite lokal dalam isu pembentukan Kabupaten Bangka Utara.